

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi sebuah penelitian pembanding dengan penelitian yang dikaji bentuk-bentuk penelitian terdahulu yang di gunakan sebagai acuan dalam penelitian. Pertama, penelitian oleh Khotibul Umam pada tahun 2013 tentang” *pemberdayaan terhadap korban penyalagunaan narkobamelalui rehabilitasi social berbasis masyarakat Bariton di desa Argodadi*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya pemberdayaan terhadap korban penyalagunaan narkobamelalui Bariton di Desa Argodadi Sedayu Kabupaten Bantul, selain itu untu menjelaskan dampak pemberdayaan terhadap koban penyalagunaan narkobamelalui Bariton. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah upaya pemberdayaan yang dilakukan Bariton dengan melalui sebuah program dengan dua tahap; pra pelaksanaan dan pelaksanaa program. Tahap pra pelaksanaa bariton melakukan tindakan:perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, sosialisasi. Tahap pelaksanaan program Bariton melakukan tindakan sosialisasi bahaya narkoba, penguatan kapasitas pengetahuan, dan keterampilan, pendampingan korban penyalagunaan

narkobadan pembinaan. Selain itu, dampak pemberdayaan terhadap korban penyalagunaan dan masyarakat sekitar yakni; terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman karena semakin berkurangnya tindakan penyalagunaan narkobayang terlihat di dusun Argodadi, meningkatkan pengetahuan tentang narkoba, bertambahnya penghasilan secara ekonomis, adanya jaminan kesehatan murah yang diperoleh.

Kedua, penelitian oleh Muhammadlu yang berjudul “ Upaya Pemberdayaan Komunitas Punk di Kota Batu”. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif interaktif. Hasil penelitian ini meliputi komunitas yang memiliki cara pikir dan cara pandang yang sedikit berbeda dengan komunitas lainnya, cara pandang atau cara pikir yang dimaksud adalah tentang perlawanan dan pembrontakan jiwa terhadap lingkungan. Kedua fungsi rumah singgah sebagai tempat berteduh sekaligus mendapatkan Sesutatu untuk mengisi perut, pelatihan keterampilan dan pembinaan. Ketiga, proses pemberdayaan yang dilakukan di rumah singgah adalah berbincang-bincang dan keterampilan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sumarwi Astuti tentang peran orang tua dalam mencegah penyalagunaan narkoba pada remaja. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran orang tua dalam mencegah penyalagunaan narkoba pada remaja. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran orang tua dalam mencegah penyalagunaan narkoba cukup baik.

Keempat, model pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan kampung wisata tematik Jodipan di kotalama Kota Malang. Oleh Dewi Atas Wati (2018) Ilmu Kesejahteraan Sosial, UMM. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa model pemberdayaan yang digunakan di kampung warna-warni jodipan adalah model pemberdayaan pengembangan masyarakat local yang di dukung dengan adanya struktur pengurus dengan program prmbaruhan cat, pembaruan lukisan, dan kerjasama pihak luar. Partisipasi masyarakat setempat sangat baik dibuktikan dengan adanya kerjasama masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan kampung dengan membuang sampah pada tempatnya.

Kelima, penelitian oleh Dewanto Jati Nugroho (2012) Pemberdayaan Pemuda Melalui Proses Rehabilitasi Korban Penyalagunaan Narkoba di Lembaga Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan upaya pemberdayaan pemuda melalui proses rehabilitasi korban penyalagunaan narkoba, factor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan pemuda melalui proses rehabilitasi korban penyalagunaan narkoba. Hasil dari penelitian menunjukan pemebrdayaan pemuda yang dilakukan oleh lembaga Panti Sosial Pamardi melalui proses rehabilitasi korban penyalagunaan narkoba, factor pendukung dalam proses pemberdayaan dan rehabilitasi.

B. Konsep Pemberdayaan

Menurut Parson (1994) dalam Anwas (2014:49-50) pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Kekuasaan merupakan konsep yang bersentuhan langsung dengan pemberdayaan. Karena kekuasaan identik dengan kemampuan untuk mengatur dan membuat orang lain melakukan sesuatu yang kita sarankan. Kekuasaan berhubungan erat dengan pengaruh dan control. Kekuasaan selalu hadir dalam konteks relasi antar manusia. Hal ini membuat konsep pemberdayaan semakin bermakna. Dengan kemungkinan terjadi proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- (2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Totok dan Poerwoko, 2017 : 29)

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat sebagai objek dari berbagai proyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang sengaja untuk memfasilitasi masyarakat local dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya local yang dimiliki

melalui *collective dan networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, social (Subejo dan Narimo 2004).

Menurut Mas'ood (1990:27) pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Menurut Kartasmita (1996:144) Bahwa keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersnagkutan. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasara yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam penegrtian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber daru apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahan nasional. Disamping itu keberdayaan masyarakat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri sebagai factor penentunya.

Pemberdayaan menurut Pranarka dan Vidhyandika dalam (Hikmat, 2010:1), konsep pemberdayaan (empowerment) muncul sekitar tahun 1970an, kemudian terus berkembang pada tahun 2980an sampai pada tahun 1990an. Konsep pemberdayaan muncul sering dengan kemunculan aliran-aliran seperti ekstensialisme, fenomologi, dan personalisme. Setelah kemunculan kosep pemberdayaan, selanjutnya masuk juga gelombang pemikiran neo-marxisme, freuadianisme dalam gelombang pemikiran

tersebut ada juga aliran-aliran struktulisme dan sosiologi kritik sekolah frankurt. Bermunculan pula konsep-konsep seperti elite, kekuasaan, antikemampuan, (anti establisme), gerakan populis, antistruktur, lrgitimasi, ideology, pembebasan dan civil society.

Pembangunan masyarakat selain mencangkup elemen social, ekonomi, dan politik juga memperhatikan elemen pengembangan masyarakat yang meliputi pengembangan budaya lingkungan, dan pengembangan spiritual (Ifc, Tcsoricro, 2008:447-448). Elemen yang demikian tentu tidak hanya menyentuh dan berhenti pada titik pembangunan tetapi juga menjangkau pada titik pengembangannya dalam berbagai basis baik basis sumberdaya local, basis modal social, basis kebudayaan, basis kearufal local, maupun baris modal spiritual (Mardikanto,2014:25). Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (marjinal, miskin, terpinggirkan) untuk meyampaikan pendapat dana tau kebutuhan, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegoisasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupan (Mardikanto& Soebianto, 2017 : 28).

Pranarka dan Vidhyandika dalam (hikmat, 2010 : 1), juga menutrukan bahwa konsep pemberdayaan merupakan bagian dari aliran *post-modernisme* yang lahir pada apruh abad 20an. Aliran ini berpusat kepada sikap dan pendapat yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan, konsep pemberdayaan muncul karena didasari atas akibat dari

dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat, dan tata budaya sebelumnya yang berkembang dalam suatu negara. Pemberdayaan adalah mengembangkan diri dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang relative terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan. Pemberdayaan menurut Suhendra adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan., dinamis, secara sinergi mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Selanjutnya pemberdayaan menurut Ife adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*). Sedangkan menurut Widjaja pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, social, agama, dan budaya.

Arthur Dunham, dalam bukunya *Outlook for community development review*, membagi tiga klasifikasi pemberdayaan masyarakat (*community development*) yaitu *Development for community* , *Development With Community* dan *Development Of community*.

1. *Development community* adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat pada posisi sebagai objek pembangunan . karena itu inisiatif, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh actor dari luar. Pendekatan seperti ini relevan dilakukan pada masyarakat yang kesadaran dan budayanya terdominasi. Namun berbagai temuan lapangan memperlihatkan bahwa pendekatan ini akan sangat mudah menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar.
2. *Development with community* adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk kolaborasi antara actor luar dan masyarakat setempat. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama, dan sumberdaya yang dipakai berasal dari potensi pihak.
3. *Development Of Community* adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sendiri sebagai agen pembangunna, sehingga inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaan dilakukan sendiri oleh masyarakat . masyarakat menjadi pemilik dari proses pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “ *people centered participatory* “, *empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses permiskinan lebih lanjut.

Menurut Subejo dan Supriyanto (2005:17:32) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu persyaratan utama dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, social, ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optima serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, social dan ekologinya.

1. Tahap-tahap pemberdayaan

Dalam melaksanakan pemberdayaan tentu tidak lepas dari tahap-tahap, agar pemberdayaan terlaksana sesuai dengan program yang sesuai dengan tujuan. Maka dari itu pemberdayaan memiliki tujuh tahapan yang dilakukan sebagai berikut (Soekanto, 1987:63):

- a. Tahap persiapan. Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu persiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker, dan kedua persiapan lapangan yakni lokasi atau komunitas masyarakat yang berpotensi untuk dikembangkan.
- b. Tahap pengkajian (assessment). Pada tahap ini yaitu proses pengkajian atau mengidentifikasi masalah dalam masyarakat.

- c. Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan. Pada tahapan ini pelakuk pemberdayaan sebagai agen perubagan secara partisipatif mencoba melibatkabn warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi.
- d. Tahap permormulasian rencana aksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- e. Tahap pelaksanaa program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaa program pemebrdayaan masyarakat , peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.
- f. Tahap evaluasi. Sebagai proses pengawasan dari warga dan pelaksana program pemberdyaan masyarakat yang sedang berjalan dan melibatkan warga.
- g. Tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahapan akhir atau pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran.

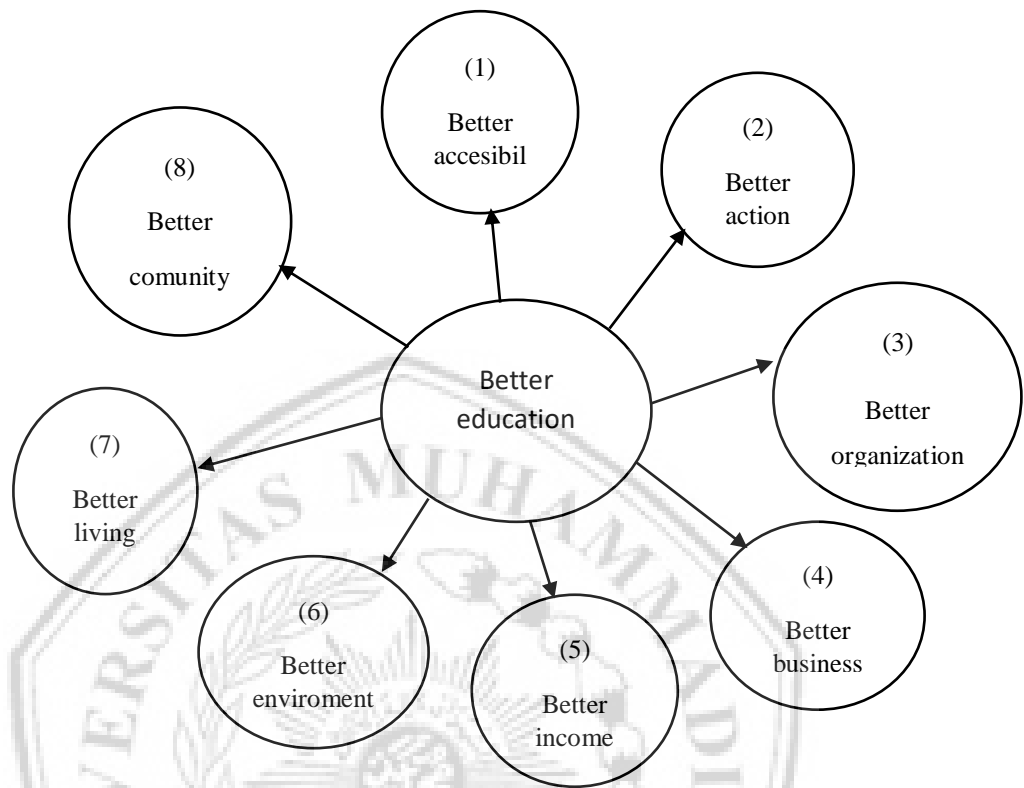
2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Hikmat, tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadilan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perilaku social yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun social

seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah sebuah upaya yang dilakukan atas dasar kesadaran dari setiap individu untuk memaksimalkan keberfungsian sosialnya.

Mardikanto dan Soebianto (2017) mengemukakan bahwa “ pemberdayaan “ merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis masyarakat (*people centered development*). Mengacu pada konsep-konsep pemberdayaan, maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya sebagai berikut:

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*), Pemberdayaan di rancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), dengan tumbuh dan perkembangannya semangat belajar seumur hidup, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitasnya. Utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi atau inovasi.
- c. Perbaikan tindakan (*better action*), dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik



Gambar 2.1
Tujuan Pemberdayaan Dari Beberapa Konsep Pemberdayaan

Sumber: adi, Isbandi. 2008

- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*), dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan.
- e. Perbaikan usaha (*better business*) perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan.
- f. Perbaikan pendapatan (*better income*), dengan adanya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang di peroleh.

- g. Perbaikan lingkungan (*better environment*), perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan social.
- h. Perbaikan kehidupan (*better living*), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan.
- i. Perbaikan masyarakat (*better community*), keadaan kehidupan yang lebih baik.

C. Konsep Narkoba

Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1976 (dalam satya joewana hlm.22) yang dimaksud dengan narkotika meliputi opioda alamiah, semi sintetik, sintetik, turunan, dan garam-garamnya(selanjutnya disingkat opioda), ganja, kokain, dan daun koka. Sedangkan secara farmakologik, yang termasuk narkotika dari ketiga golongan zat tersebut hanya opioda. Menurut Delay dan Denniker yang membagi psikotropika menjadi tiga golongan, opioda tergolong psikoleptika, kokain tergolong psikoanaleptika, sedangkan ganja tergolong psikodisleptika.

Menurut Poerwadarminta, Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narco* atau *narcosis* yang bearti menidurkan dan pembiusan. Menurut sudarto Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang bearti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sedangkan menurut Anton M

secara termologi, dalam kamus besar Bahasa Indonesia narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut Kanwil Depdiknas menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan menurut Hasan Shadily dalam kedokteran narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari virus atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Jadi dari sekian banyak pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

Dalam UU No. 22/1997 adalah tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun ganja, garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sintesis maupun semi sintesis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh menteri

kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campura atau sediaan-sediaan yang mengandung garam atau turunan dari morfina dan kokaina, bahan-bahan lain alami atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Menurut dr. Subagyo Partodiharjo narkotika dibagi dalam 3 jenis yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi kedalam beberapa kelompok.

Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1997, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, II, III. Berdasarkan cara pembuatan dibagi menjadi 3 golongan yaitu alami, semisintesis, dan sintesis.

- 1) Narkotika Alami, narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan alam
 - a. Ganja, adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun jika di bakar dan dihirup zat adiktifnya sangat tinggi.

- b. Hasis, adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di amerika latin dan eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya.
 - c. Koka, adalah tanamn perdu mirip pohon kopi, buahnya yan matang bewarna merah seperti biji kopi. Biji koka sering digunakan untuk menambha kkeuatan orang yang berperang.
 - d. Opium, adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah opium dihasilkan candu(opiat)
- 2) Narkotika Semisintesis, adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.
- a. Morfin, dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi.
 - b. Kodein, dipakai untuk obat penghilang batuk.
 - c. Heroin, tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan.
 - d. Kokain, hasil olahan dari biji koka.
- 3) Narkotika Sintesis, adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba.

- a. Petidin obat bius local, operasi kecil, sunat.
- b. Methadone untuk pengobatan pencandu narkoba.
- c. Naltraxon untuk pengobatan pencandu narkoba.

Psikotropika adalah zat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokkan ke dalam 3 golongan

- 1) Kelompok depresan/ penekanan saraf pusat/ penenang/ obat tidur
Contohnya: valium BK, rohipno, mogadon, dan lain-lain.
- 2) Kelompok stimula/ perangsang saraf pusat / anti tidur
Contohnya : amfetamin, ekstasi, shabu.
- 3) Kelompok halusinogen, adalah obat, zat, tanaman, makanan, minuman yang dapat menimbulkan khayalan. Contohnya adalah LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), getah tanaman kaktus, kecubung, jamur tertentu (*misceline*), dan ganja. Bila diminum psikotropika ini akan mendatangkan khayalan.

Bahan adiktif adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya :

- 1) Rokok
- 2) Kelompok alcohol dan minuman lain yang memabukan dan menimbulkan ketagihan.

- 3) Thinner dan zat-zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium dapat memabukkan.

Jadi alcohol, rokok, serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

D. Konsep Komunitas

Menurut Imam Moedjiono (dalam buku Kepemimpinan dan Keorganisasian) Komunitas atau organisasi merupakan bentuk kerja sama antara beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan dengan mengadakan pembagian dan peraturan

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Sarason pada tahun 1974 (dalam Dalton et al, 2007) bahwa komunitas adalah penyedia dengan mudah jaringan hubungan saling mendukung satu sama lain dan masing-masing individu memiliki ketergantungan di dalamnya. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin *communitas* yang berarti “kesamaan”, kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti “sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak”.

Menurut Tony (2014) Komunitas adalah suatu unit atau kesatuan social yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*community of common interest*), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “ masyarakat setempat “. Komunitas dalam perspektif Sosiologi adalah warga setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat yang lebih luas melalui kedalaman perhatian bersama atau oleh tingkat interaksi yang tinggi.

Menurut Adi (2008) komunitas setidaknya harus mempunyai 3 unsur. Yaitu 1. Adanya batasan wilayah setempat, 2. Merupakan suatu organisasi social atau institusi social yang menyediakan kesempatan untuk para warganya agar dapat melakukan interaksi antar warga secara regular, 3. Interaksi social yang dilakukan terjadi karena adanya minat ataupun kepentingan yang sama. Selanjutnya, menurut Imam (2002 : 53) Komunitas adalah bentuk kerjasama antara beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan dengan mengadakan pembagian dan peraturan kerja.

Menurut Paston pemberdayaan komunitas adalah sebagai suatu proses membangun relasi atau hubungan social baik secara horizontal (dalam komunikasi) maupun vertical (antar komunitas). Menurut Mardika pemberdayaan komunitas adalah upaya yang dilakukan oleh pihak luar untuk menumbuhkan daya nalar dan keterampilan masyarakat setempat agar mereka secara mandiri mampu memanfaatkan potensi dan peluang untuk mengelola program-program. Sedangkan

menurut Conyers pemberdayaan komunitas adalah sebagai suatu proses yakni semua swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, social, maupun kultural serta untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan memberikan kesempatan yang memungkinkan masyarakat tersebut membantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa.

1. Prinsip dasar Pemberdayaan Komunitas

Menurut Rubin (dalam Sumaryadi, 2005:9496) mengemukakan lima prinsip dasar pemberdayaan komunitas diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan komunitas memerlukan breakeven dalam setiap kegiatan yang dikelola, meskipun berbeda dengan organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan komunitas keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
- b. Pemberdayaan komunitas selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
- c. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas, kegiatan pelatihan merupakan unsur.
- d. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan.

- e. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Menurut Rothman dan Tropman (1987:10). Rothman (1987&1995) dalam buku Riyadi Nanang (2012) menggunakan dua belas variabel untuk membedakan ketiga model intervensi(pendekatan) yang dilakukan dalam intervensi social di level komunitas, sebagai berikut:

1. Kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat.
2. Asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahannya.
3. Starategi dasar dalam melakukan perubahan.
4. Karakteristik taktik dan teknik perubahan.
5. Peran praktisi yang menonjol.
6. Media perubahan.
7. Orientasi terhadap struktur kekuasaan.
8. Batasan definisi penerima layanan
9. Asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok di dalam komunitas
10. Konsepsi mengenai penerima layanan (beneficiaries)
11. Konsepsi mengenai peran penerima layanan
12. Pemanfaatan pemberdayaan

Dalam hal ini menurut Jack Rothman dalam klasiknya mengembangkan 3 model yang berbunga dalam memahami konsep tentang pemberdayaan masyarakat diantaranya: a. Pemberdayaan masyarakat lokal.

Menurut Suharto Edi (2010) dalam bukunya *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri, anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

2. Perencanaan sosial.

Perencanaan sosial disini menunjukkan pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk dan lain-lain. Perencanaan sosial lebih berorientasi pada “tujuan tugas” (task goal). Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups) atau kelompok rawan sosial ekonomi, seperti para lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu, wanita tuna susila, para perencana sosial dipandang sebagai ahli (expert) dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pelayanan kemanusiaan.

3. Aksi sosial

Tujuan dan sasaran aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamentalis dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (distribution of power), sumber (distribution of resources) dan pengambilan keputusan (distribution of decision making) pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang sering kali menjadi korban ketidakadilan struktur.

E. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Bornby 1974 (dalam Aprilia 2014) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “ mengambil bagian “ yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat (Webster, 1976). Karakteristik dari proses partisipasi adalah, semakin mantapnya jaringan social (*social network*) yang “ baru” yang membentuk suatu jaringan social bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan social yang baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur social yang bersangkutan.

Sebagai suatu kegiatan, Verhangen 1979(dalam Aprilia dkk 2014) menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian:kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

- a. Yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki,
- b. Kondisi tertentu dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakat.
- c. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Adanya kepercayaan diri, bahwa dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

1. Bentuk-bentuk Partisipasi

Dusseldorp, (1981) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- (1) Menjadi anggota kelompok-kelompok.
- (2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- (3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan sumberdaya masyarakat.
- (4) Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
- (5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- (6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.

2. Tingkatan Partisipasi

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox (1988) mengemukakan ada lima tingkatan yaitu:

- (1) Memberikan informasi (*Information*).
- (2) Konsultasi (*Consultation*) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan.
- (3) Pengambilan keputusan bersama (*Deciding together*) dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan.
- (4) Bertindak bersama (*Acting together*) artinya tidak sekadar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dalam menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan.

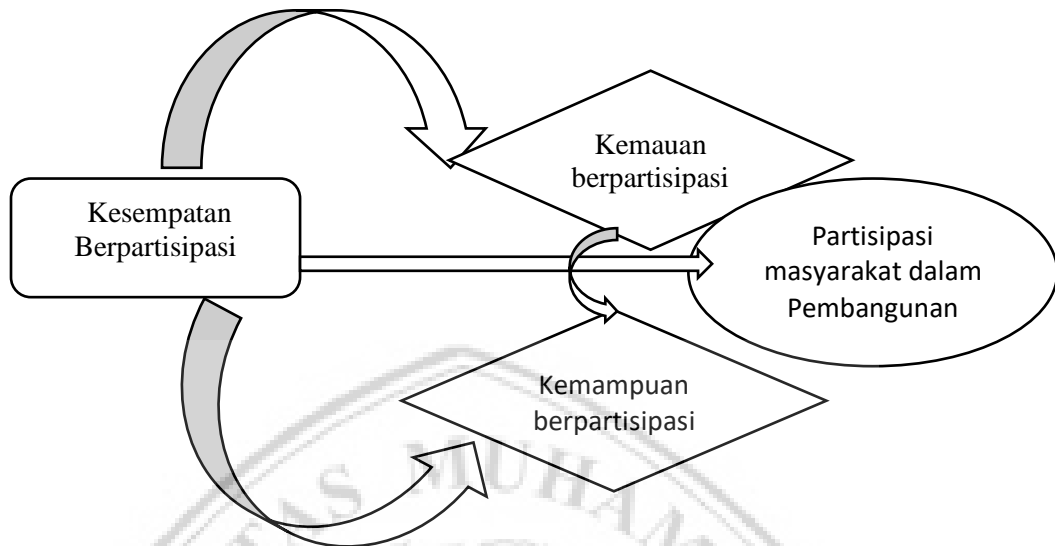
- (5) Memberikan dukungan (*Supporting independent community interest*), dimana kelompok-kelompok local menawarkan pendanaa, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda lainnya.

3. Syarat Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan, pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup(kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, social, fisik, maupun mental. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan(aparat) pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekadar objek atau penikmat hasil pembangunan melainkan subjek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Slamet 1985 (dalam Aprillia dkk 2014) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- (1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
- (2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
- (3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.



Gambar 2.2 Syarat Tumbuh dan Berkembang Partisipasi Masyarakat
(Mardikanto, 2003)

1. Kesempatan untuk Berpartisipasi

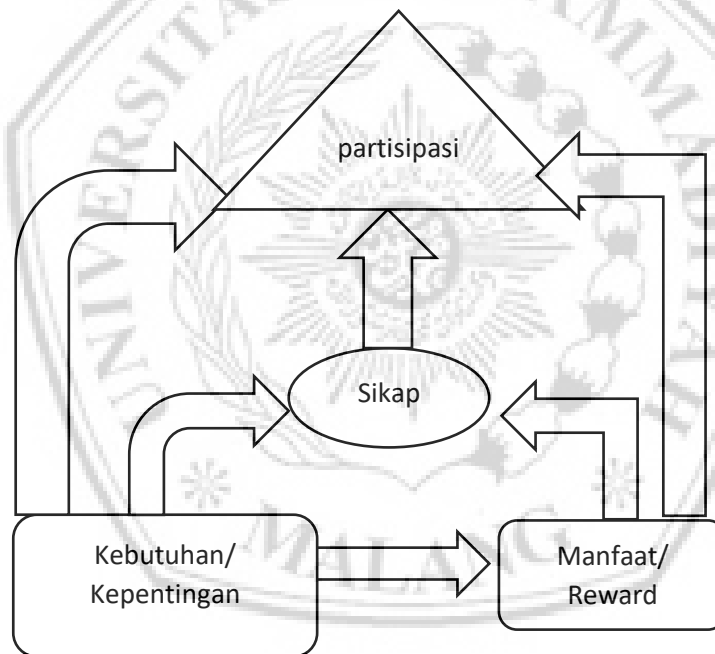
Dalam kenyataan, banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu kurangnya informasi. Kesempatan yang dimaksud adalah kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

2. Kemampuan untuk Berpartisipasi

Yang dimaksud dengan kemampuan untuk berpartisipasi disini adalah kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun, kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan, kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

3. Kemauan untuk Berpartisipasi

Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya yang menyangkut sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan, sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan, sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup, sikap untuk memecahkan masalah, sikap kemandirian atau percaya diri.



Gambar 2.3
3 Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap
Tumbuh Kembangnya Partisipasi
(Mardikanto, 2003)